

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik Rusia-Ukraina yang diawali pada 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak secara global, seperti memicu terjadinya krisis ekonomi global serta mengancam keamanan dan stabilitas global. Sebagai akibat dari konflik ini Rusia mendapatkan ancaman hingga sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Bentuk dari sanksi ekonomi tersebut salah satunya adalah dengan Uni Eropa yang menetapkan kebijakan embargo untuk minyak mentah dan minyak bumi Rusia.<sup>1</sup> Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar bagi Uni Eropa, embargo tersebut mengakibatkan Uni Eropa mengalami kelangkaan terhadap energi. Selanjutnya Rusia dan Ukraina juga merupakan eksportir terbesar dunia bagi komoditas gandum, jagung, biji bunga matahari, kalium, fosfor dan pupuk urea.<sup>2</sup> Pelabuhan Laut Hitam merupakan pintu utama bagi komoditas ekspor dari Rusia dan Ukraina, namun karena adanya konflik, pelabuhan tersebut tidak bisa digunakan. Terganggunya eksportir gandum berdampak pada ketahanan pangan global terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

Melihat akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut, maka perlu dilakukan upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian. Indonesia sebagai negara ketua G20 merespons konflik ini dengan tidak menunjukkan keberpihakannya

---

<sup>1</sup> Ben Cahill, "European Union Imposes Partial Ban on Russian Oil," *Center for Strategic and International Studies*, 22M, <https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil>.

<sup>2</sup> Khondoker Abdul Mottaleb, Gideon Kruseman, dan Sieglinde Snapp, "Potential impacts of Ukraine-Russia armed conflict on global wheat food security: A quantitative exploration," *Global Food Security* 35 (Desember 2022): 100659, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211912422000499>.

<sup>3</sup> Mottaleb, Kruseman, dan Snapp, "Potential impacts of Ukraine-Russia armed conflict on global wheat food security: A quantitative exploration."

baik terhadap Rusia maupun Ukraina.<sup>4</sup> Dalam kicauan twitternya Presiden Joko Widodo menyuarakan agar perang tersebut dihentikan, karena akan hanya membawa kerugian bagi manusia dan dunia.<sup>5</sup> Dalam kicauan tersebut Presiden Jokowi tidak mengutuk Rusia atas invasinya ke Ukraina. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menunjukkan sikap yang serupa. Dalam merespons konflik tersebut Kemlu mengeluarkan pernyataan yang diberi judul “*Indonesian Government Statement regarding the Military Attack in Ukraine*”.<sup>6</sup> Pernyataan Kemlu tersebut pada intinya menyerukan ke dua belah pihak untuk menghormati piagam PBB terhadap integritas wilayah dan kedaulatan dan mendesak DK PBB untuk mengambil langkah untuk mengatasi konflik tersebut. Berdasarkan pernyataan Kemlu tersebut juga dapat terlihat bahwa Indonesia tidak menyebutkan Rusia sebagai agresor dalam konflik ini dan menganggap bahwa konflik yang terjadi merupakan tanggung jawab kedua negara.

Selain tidak menunjukkan keberpihakannya, Indonesia juga turut aktif dalam mengambil inisiasi untuk menjadi mediator dalam konflik Rusia-Ukraina tersebut. Tindakan Indonesia sebagai mediator ini dikenal juga dengan istilah “*peace mission*” atau misi perdamaian. Misi perdamaian ini dilakukan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dengan cara mengunjungi dan berdialog langsung dengan presiden Ukraina dan Rusia di negaranya masing-masing. Presiden

---

<sup>4</sup> Radityo Dharmaputra, “Understanding Indonesia’s Response to Russia’s war in Ukraine: A Preliminary Analysis of the Discursive Landscape,” *Journal Of Global Strategic Studies* 2, no. 1 (Juni 27, 2022): 115–128, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/JGSS/article/view/1057>.

<sup>5</sup> Dharmaputra, “Understanding Indonesia’s Response to Russia’s war in Ukraine: A Preliminary Analysis of the Discursive Landscape.”

<sup>6</sup> Kemlu, “Indonesian Government Statement regarding the Military Attack in Ukraine,” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2022, <https://kemlu.go.id/vancouver/en/news/17861/indonesian-government-statement-regarding-the-military-attack-in-ukraine>.

Jokowi awalnya bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kiev pada tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya Presiden Jokowi bertemu dengan presiden Vladimir Putin pada tanggal 30 Juni 2022 di Moskow. Harapannya dengan kunjungan tersebut Indonesia dapat menjadi jembatan dalam membentuk perdamaian antar dua negara tersebut.<sup>7</sup> Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan bahwa "Presiden Jokowi 'memilih untuk berkontribusi, tidak tinggal diam' dan menolak 'diplomasi megafon untuk memastikan bahwa tujuan yang lebih besar yaitu memulihkan perdamaian dunia dapat tercapai'".<sup>8</sup> Kunjungan Presiden Jokowi ke dua negara tersebut juga menjadi momentum bagi Jokowi menyampaikan undangannya secara langsung kepada kedua pemimpin negara tersebut untuk menghadiri KTT G20 di Bali.

Respons Indonesia dalam konflik ini menjadi menarik untuk dilihat mengingat posisi Indonesia sebagai ketua G20 pada tahun 2022. G20 merupakan organisasi internasional yang tujuan awal dibentuknya adalah untuk mengatasi krisis finansial global yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998.<sup>9</sup> G20 terdiri dari 19 negara anggota dan satu organisasi supranasional yaitu Uni Eropa. Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 dilihat sebagai tantangan dari terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022. Pemerintahan Indonesia sempat mengkhawatirkan bahwa konflik Rusia-Ukraina

---

<sup>7</sup> Antara, "Russia-Ukraine war and the Indonesian peace mission," *Antara News*, 2022, <https://en.antaranews.com/news/237153/russia-ukraine-war-and-the-indonesian-peace-mission>.

<sup>8</sup> Ann Marie Murphy, "Ukraine war highlights differences between Indonesian and US foreign policy frameworks," *East Asia Forum*, 2022, <https://www.eastasiaforum.org/2022/08/05/ukraine-war-highlights-differences-between-indonesian-and-u-s-foreign-policy-frameworks/#:~:text=Indonesia's foreign policy stance differs,and demanding that Russia withdraw>.

<sup>9</sup> Totok Sudjatmiko et al., "Peran Indonesia Sebagai Kekuatan Menengah dalam G20 Di Tengah Disrupsi Geopolitik Konflik Rusia-Ukraina," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 2 (Desember 30, 2022): 93, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/1224>.

ini dapat mengganggu proses berjalannya KTT G20 di Bali. Keberhasilan KTT G20 menjadi pencapaian tersendiri bagi Indonesia mengingat ini merupakan kali pertama bagi Indonesia untuk memegang jabatan sebagai ketua G20 semenjak bergabung pada tahun 1999.

Inisiasi sebagai mediator perdamaian yang diambil oleh Presiden Jokowi ini sangat berbeda dari pendekatan kebijakan luar negeri yang diusung selama masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia selalu terlihat hanya berfokus terhadap politik domestik. Presiden Jokowi melihat dirinya sebagai reformis domestik bukan seorang negarawan internasional.<sup>10</sup> Presiden Jokowi tidak tertarik dengan diplomasi dan tidak tertarik dengan isu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan global. Oleh sebab itu selama masa periode pertama kepemimpinannya Presiden Joko Widodo tidak pernah menghadiri sidang tahunan majelis umum PBB, kehadiran Indonesia dalam sidang tersebut selalu diwakili oleh wakil presiden Indonesia saat itu yaitu Jusuf Kalla.<sup>11</sup> Selanjutnya pada periode kedua masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo hanya menghadiri dua kali sidang tahunan majelis umum PBB yaitu pada tahun 2020 dan 2021 yang saat itu diadakan melalui konferensi video. Sedangkan dalam konteks merespons konflik Rusia-Ukraina, Presiden Jokowi menempatkan dirinya sebagai aktor utama yang turun langsung dalam proses *peace mission* dengan berdiplomasi atau berdialog langsung dengan kedua pemimpin negara tersebut.

---

<sup>10</sup> Laura Schwartz, "Indonesian Foreign Policy under Jokowi," *The National Bureau of Asian Research* (2015), <http://nbr.org/research/activity.aspx?id=510>.

<sup>11</sup> "The Reason Behind Jokowi's Consecutive Absence in UN General Assembly," *Dinsights Katadata*, 2022, <https://dinsights.katadata.co.id/read/2022/09/20/the-reason-behind-jokowis-consecutive-absence-in-un-general-assembly>.

Pada periode kedua pemerintahannya, kebijakan luar negeri Presiden Jokowi berfokus pada prioritas pembangunan dalam negeri, diplomasi ekonomi, dan kebijakan luar negeri untuk menarik investasi.<sup>12</sup> Tujuan utama dalam fokus kebijakan luar negeri tersebut adalah untuk memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi tersebut disebut sebagai kebijakan yang *inward-looking* atau berorientasi ke dalam.<sup>14</sup> *Inward-looking* dapat diartikan sebagai strategi kebijakan yang digunakan untuk lebih memprioritaskan membangun kekuatan domestik suatu negara sebelum berpartisipasi dalam politik internasional.<sup>15</sup>

Sedangkan ketika Presiden Jokowi menginisiasi menjadi mediator perdamaian dalam konflik Rusia-Ukraina, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang selama ini diambil oleh Presiden Jokowi. Respons dan inisiasi Presiden Jokowi sebagai mediator menunjukkan tidakkan yang mengisyaratkan bahwa ia mulai tertarik berpartisipasi dalam politik internasional. Selanjutnya hal ini menjadi lebih unik ketika Presiden Jokowi yang tidak suka berdiplomasi itu sendiri yang menjadi aktor utama dalam proses diplomasi untuk mendamaikan Rusia-Ukraina. Berdasarkan hal tersebut, penulis

---

<sup>12</sup> . Darwis dan Bama Andika Putra, "The Decline of Indonesia's Leadership Role in ASEAN: Systemic and Domestic Constraints of Jokowi's Foreign Policy Alterations," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 1 (Januari 3, 2022): 115, <https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12756>.

<sup>13</sup> Sui-Lee Wee, "Once Inward-Looking, Joko Widodo Casts Himself as a Global Statesman," *The New York Times*, 2022, <https://www.nytimes.com/2022/11/13/world/asia/indonesia-joko-widodo-g20.html>.

<sup>14</sup> Sulistia Wargi, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia," *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (Agustus 29, 2021): 320–341, <https://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/228>.

<sup>15</sup> Sulistia Wargi, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia."

melihat perlu kiranya untuk dikaji lebih dalam persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

Presiden Joko Widodo merupakan presiden yang dicirikan memiliki pendekatan *inward-looking* dalam kebijakan luar negerinya. Selama masa pemerintahannya Indonesia berfokus pada peningkatan dan penguatan pembangunan domestik. Terlihat ketika kebijakan luar negeri yang diambilnya berfokus pembangunan dalam negeri, diplomasi ekonomi, dan kebijakan luar negeri untuk menarik investasi, yang tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Joko Widodo bukanlah seorang negarawan internasional, dalam masa kepemimpinannya Presiden Jokowi hanya dua kali menghadiri sidang tahunan majelis umum PBB, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Hal itu menunjukkan ketidaktertarikannya pada isu perdamaian dan keamanan global. Namun dalam merespons konflik Rusia-Ukraina Presiden Jokowi menempatkan dirinya sebagai aktor utama yang turun langsung dalam proses *peace mission* dengan berdiplomasi kedua pemimpin negara tersebut. Kebijakannya dalam menginisiasi "*peace mission*" ini dinilai tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang selama ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat perlu kiranya untuk dikaji lebih dalam persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah "Bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022?"



## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022.

## 1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara melalui level individu sebagai bentuk respons terhadap fenomena dan isu tertentu;
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pemahaman pembaca dalam memahami proses pengambilan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo serta dapat dijadikan pertimbangan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk pengambilan kebijakan luar negeri selanjutnya.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berpedoman terhadap literatur dan penelitian sebelumnya yang dirasa relevan dan sesuai dengan topik yang diteliti, tujuannya adalah untuk menganalisis dan mencari jawaban dari penelitian ini. Literatur tersebut yaitu:

Literatur pertama yaitu artikel yang berjudul *Let sleeping bears lie: an analysis of the factors behind Indonesia's response to the Russo-Ukrainian war and its implications for the Indo-Pacific Region* yang ditulis oleh Leonardo C. Sebastian dan Keoni Marzuki.<sup>16</sup> Artikel ini menjelaskan tentang respons Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri

---

<sup>16</sup> Leonard C. Sebastian dan Keoni Marzuki, "Let sleeping bears lie: an analysis of the factors behind Indonesia's response to the Russo-Ukrainian war and its implications for the Indo-Pacific region," *International Politics* (September 20, 2023), <https://link.springer.com/10.1057/s41311-023-00478-0>.

*equidistant*. Respons Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina dalam artikel ini dinilai sebagai respons yang pragmatis, yang mana respons Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan faktor domestik terhadap prinsip kebijakan luar negeri dalam mandat konstitusi.

Faktor domestik yang mendorong respons Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pasca pandemi COVID-19. Rusia merupakan salah satu mitra perdagangan yang penting bagi Indonesia, dengan total perdagangan mencapai 19 triliun dolar AS pada tahun 2020. Disisi lain Ukraina juga merupakan mitra perdagangan penting bagi Indonesia, khususnya pada perdagangan gandum dan biji-bijian. Ukraina merupakan salah satu pemasok gandum terbesar bagi Indonesia dengan total impor mencapai 15-20% dari keseluruhan impor gandum Indonesia. Respons pragmatik yang dipilih oleh Indonesia menyebabkan Indonesia bisa memelihara hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina.

Faktor kedua adalah, posisi Indonesia sebagai ketua G20. Invasi Rusia ke Ukraina memunculkan kekhawatiran bagi Indonesia tentang kesuksesan G20. Ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk memboikot Rusia dan menarik diri dari KTT G20 merupakan hal yang tidak akan menguntungkan bagi Indonesia sebagai ketua G20. Indonesia tidak menginginkan forum ekonomi seperti KTT G20 juga membahas isu geopolitik, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Selanjutnya konflik Rusia-Ukraina dapat membatasi diskusi dalam KTT G20.

Ketiga adalah hubungan strategis dengan Rusia dan ambisi memodernisasi pertahanan. Hubungan strategis ini didasarkan kepada dua tujuan yaitu,



kepentingan Rusia dalam meningkatkan pengaruhnya di pasar senjata Asia Tenggara, dan kepentingan Indonesia dalam memperbanyak pasokan persenjataannya untuk meningkatkan ketahanannya terhadap sanksi senjata. Keempat adalah pro Rusia dan sentimen anti barat. Walaupun pemerintah Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan terhadap Rusia ataupun Ukraina, namun kebanyakan opini dan wacana yang berada di tengah Masyarakat terutama media sosial lebih menunjukkan keberpihakan terhadap Rusia daripada Ukraina.

Artikel ini berkontribusi bagi penelitian ini untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia dan faktor-faktor yang mendasari Indonesia dalam mengambil sikap dalam merespons konflik Rusia-Ukraina. Faktor-faktor ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan alasan pragmatis kenapa Indonesia mengambil kebijakan dalam mediasi konflik Rusia-Ukraina yang mana tujuannya tidak hanya sekedar untuk menciptakan perdamaian. Artikel yang ditulis oleh Leonardo C. Sebastian dan Keoni Marzuki ini menggunakan pendekatan pragmatis dengan level analisis negara untuk menjelaskan respons Indonesia tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep persepsi dengan level analisis individu untuk menjelaskan bagaimana pengaruh persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022.

Literatur kedua adalah artikel yang berjudul "*Understanding Indonesia's Response to Russia's war in Ukraine: A Preliminary Analysis of the Discursive Landscape*" yang ditulis oleh Radhityo Darmaputra.<sup>17</sup> Artikel ini menjelaskan tentang diskursus yang terjadi di Indonesia dalam konteks konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri menggunakan konsep pos-

---

<sup>17</sup> Dharmaputra, "Understanding Indonesia's Response to Russia's war in Ukraine: A Preliminary Analysis of the Discursive Landscape."

strukturalisme. Pertama, artikel ini menjelaskan tentang pentingnya diskursus dalam kebijakan luar negeri. Hansen (2006) di dalam artikel ini dituliskan bahwa, untuk memahami kebijakan luar negeri suatu negara kita juga harus memahami berbagai level diskursus intertekstual, seperti dari pemerintahan misalnya presiden atau Menteri luar negeri, dari akademisi, ahli, dan lebih luar melalui representasi dari media.

Selanjutnya, artikel ini menjelaskan lebih lanjut tentang diskursus yang terjadi di Indonesia dalam berbagai level. Pertama adalah dikursus pemerintah, Presiden Jokowi dalam twitternya mengatakan bahwa "*Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia.*" Selanjut saat di interview oleh CNBC pada Juni Presiden Jokowi juga mengatakan "*We want the war in Ukraine to be stopped.*" Berdasarkan dari kedua pernyataan Presiden Jokowi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia enggan menyebutkan Rusia sebagai agresor dalam konflik ini dan mengisyaratkan bahwa konflik ini merupakan tanggung jawab dari kedua negara. Tindakan netral atau ketidakberpihakan ini juga terlihat dari tindakan Presiden Jokowi yang mengundang Rusia dan Ukraina ke KTT G20 di Bali.

Kedua adalah diskursus Masyarakat, Masyarakat Indonesia pada umumnya di media sosial lebih banyak menunjukkan dukungan ke Rusia dibuktikan oleh analisis media sosial yang dilakukan oleh Evello. Sedangkan survei yang dilakukan oleh SMRC mengatakan hanya 20% masyarakat Indonesia yang benar-benar mendukung Rusia. Alasan utama kenapa Masyarakat Indonesia mendukung Rusia adalah karena adanya sentimen anti-barat di tengah Masyarakat Indonesia dengan Rusia dianggap sebagai kekuatan yang anti-barat. Ketiga adalah

dikursus para ahli, Kebanyakan opini dan pernyataan akademisi dan intelektual publik di Indonesia bersimpati terhadap posisi Rusia dengan menunjukkan keraguan, kehati-hatian, dan netralitas, yang secara tidak langsung telah mendukung tindakan agresor Rusia.

Artikel yang ditulis oleh Radityo ini berkontribusi dalam penelitian ini untuk memahami diskursus dari kalangan pemerintah terutama Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022. Diskursus tersebut diambil dari pernyataan resmi Presiden Joko Widodo melalui Twitter resminya dan melalui wawancara dengan berbagai wartawan. Artikel ini menjelaskan tentang diskursus yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022.

Literatur yang ketiga adalah artikel yang berjudul *Indonesia's role in the G20 presidency during the conflict between Russia and Ukraine* yang ditulis oleh Ria Purwati dan kawan-kawan.<sup>18</sup> Artikel ini pada umumnya menjelaskan bagaimana peran Indonesia sebagai ketua G20 di tengah konflik Rusia-Ukraina. Sejauh mana Indonesia menggunakan perannya sebagai ketua G20 dan kontribusi yang diberikan oleh Indonesia untuk menyikapi konflik tersebut sebagai negara non-blok.

Terdapat dua kepentingan utama Indonesia dalam keikutsertaannya dalam forum G20, yang pertama adalah sebagai negara yang berusaha untuk menyesuaikan standar kualitas produk sesuai dengan konsumen global. Kedua,

---

<sup>18</sup> Ria Purwati, Hikmat Zakky Almubaroq, dan Edy Saptono, "Indonesia's role in the G20 presidency during the conflict between Russia and Ukraine," *Defense and Security Studies* 4, no. January (Januari 31, 2023): 23–28, <https://journals.ardascience.com/index.php/dss/article/view/228>.

Indonesia berkesempatan untuk mendapatkan peluang pasar yang luas, transfer teknologi dan kerja sama yang terbuka. Keikutsertaan Indonesia di G20 dianggap penting demi kestabilan regional. Selanjutnya kepentingan Indonesia dalam keikutsertaannya dalam G20 juga didukung oleh kepentingan *bargaining power position* yang tinggi, karena dengan posisi Indonesia di forum global tersebut, keputusan Indonesia dapat digunakan sebagai perwakilan dari negara berkembang dalam forum-forum multilateral.

Sebagai ketua G20, Indonesia juga membahas politik hukum dan keamanan yang terkait dengan konflik Rusia-Ukraina, namun pembahasan tersebut juga tidak akan bisa lepas dari isu utama yaitu perekonomian. Sebagai ketua G20 sangat penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menyelesaikan konflik tersebut karena Ukraina merupakan produsen terbesar gandum di dunia, yang mana jika pasokan terhadap gandum terganggu maka akan berisiko menyebabkan terjadi inflasi diantara negara-negara di dunia, baik negara anggota G20 maupun non-anggota G20. Mengingat hal tersebut maka mediator sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini. Indonesia dianggap menjadi salah satu negara yang dianggap mampu menjadi mediator dan membantu menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal ini dikarenakan Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik, salah satunya konflik Kamboja pada tahun 1988 dan 1989. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki hubungan yang baik dengan Rusia dan Ukraina.

Artikel ini memberikan beberapa kontribusi bagi penelitian ini. Pertama artikel ini berkontribusi dalam menjelaskan posisi Indonesia sebagai ketua G20 di tengah konflik Rusia-Ukraina. Kedua berkontribusi dalam menjelaskan

bagaimana seharusnya Indonesia memainkan perannya sebagai ketua G20 dalam konflik Rusia-Ukraina untuk menciptakan *legacy* bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo demi suksesnya pelaksanaan G20. Selanjutnya artikel ini juga berkontribusi dalam menjelaskan kepentingan lain Indonesia sebagai mediator dalam konflik Rusia-Ukraina yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan ekonomi untuk menciptakan stabilitas ekonomi secara global dan Indonesia khususnya.

Literatur keempat adalah artikel yang berjudul *Diplomatic Bluff against Indonesia's G20 Presidency amid the Ukraine - Russia Conflict: A View from Political Psychology*, yang ditulis oleh Ogi Nanda Nugraha dkk.<sup>19</sup> Selar dengan judulnya artikel ini menjelaskan tentang gertakan yang didapatkan oleh Indonesia sebagai ketua G20 dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. *Diplomatic bluff* diartikan sebagai kondisi di mana dalam melakukan negosiasi, negosiator mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan, hal ini diakibatkan oleh sikap licik yang dimiliki oleh pihak yang kuat dan tidak mau menerima pendapat dari pihak yang lemah.

Kehadiran Indonesia dalam forum G20 sebagai ketua dinilai penting karena dianggap mampu mewakili kepentingan dari negara-negara berkembang lainnya. Namun hal tersebut berpotensi terhalangi oleh konflik geopolitik yang semakin diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina, partisipasi perdagangan Indonesia yang rendah dengan negara anggota G20 lainnya, dan tantangan energi terbarukan. Konflik Rusia-Ukraina merupakan tantangan yang berpotensi paling

---

<sup>19</sup> Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha et al., "Diplomatic Bluff against Indonesia's G20 Presidency amid the Ukraine - Russia Conflict: A View from Political Psychology," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 2 (Agustus 7, 2022): 123–141, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PJDIR/article/view/2241>.

merugikan Indonesia sebagai ketua G20. Agenda Indonesia yang berfokus pada pemulihan yang merata pasca pandemi COVID-19 terancam terhalangi oleh agenda untuk membahas konflik Rusia-Ukraina. Beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Lituania, Polandia, dan Kanada setuju untuk mengeluarkan Rusia dari G20.

Indonesia mendapatkan kritikan dan desakan dari negara-negara barat untuk tidak mengikut sertakan Rusia dalam KTT G20 di Bali. Namun Indonesia memilih untuk tidak menghiraukan hal tersebut. Indonesia sebagai negara non blok harus mengambil posisi yang natural dan tidak memihak terhadap ancaman dan boikot. Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengikut sertakan Rusia di KTT G20. Rusia merupakan salah satu negara yang berpengaruh bagi KTT G20. Indonesia selanjutnya merespons dengan juga mengikutsertakan presiden Ukraina untuk menghadiri KTT G20. Hal ini dianggap sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengasah pengaruhnya dalam mengatasi konflik dan meredakan tensi negara barat yang menginginkan Rusia untuk tidak diikut sertakan.

Artikel ini berkontribusi bagi penelitian ini untuk memberikan pemahaman terhadap penulis tentang dinamika tekanan yang diterima Indonesia sebagai ketua G20 di tengah konflik Rusia-Ukraina. Dinamika tekanan tersebut juga dapat mempengaruhi persepsi Presiden Jokowi dalam melihat dan akhirnya merespons konflik ini. Respons yang tidak tepat dapat berpotensi membahayakan Indonesia sebagai ketua G20 dan membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Artikel ini membahas tentang respons dari negara-negara barat yang menjadi faktor pengaruh pengambilan keputusan Indonesia sedangkan penelitian ini menjelaskan



bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022.

Literatur kelima adalah bagian artikel yang berjudul Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna yang ditulis oleh Tomy Darma Putra.<sup>20</sup> Artikel ini menggunakan pendekatan idiosinkratik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggapi pelanggaran Cina di Natuna. Idiosinkratik melihat individu sebagai objek utama yang akan diteliti, yang mana dalam konteks individu faktor yang diteliti tidak hanya terbatas pada karakteristik personal, kognitif individu, gaya kepemimpinan namun juga kepribadian. Artikel ini juga menegaskan bahwa kepribadian yang dimiliki oleh individu berpengaruh pada keputusan yang ia buat.

Artikel ini menjelaskan bahwa dalam kebijakan luar negara untuk menanggapi pelanggaran Cina di Natuna, Jokowi dicirikan sebagai presiden yang pertama, memiliki kompleksitas konseptual yang rendah dalam memahami perspektif Indonesia di Laut Cina Selatan. Kedua, Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dalam hal upaya untuk menegakkan kedaulatan di Natuna, hal ini terlihat dibuktikan dengan kebijakan Jokowi yang berambisi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ketiga, Jokowi memiliki kebutuhan akan kuasa yang tinggi terhadap penangkapan kapal Cina, Jokowi berusaha menampilkan citra yang memiliki kapasitas *power* yang kuat dengan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Keempat, keyakinan mengontrol

---

<sup>20</sup> Tomy Darma Putra dan Muhamad Rosyidin, "Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna," *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 5, no. 2 (2019): 323–331.

peristiwa yang tinggi, dan kelima, ketidakpercayaan dengan orang lain yang rendah terutama dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina.

Artikel ini berkontribusi bagi penelitian ini untuk memberi pemahaman bagi penulis bahwa faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negara yang diambilnya. Selanjutnya artikel ini menjadi pedoman bagi penulis untuk memahami kepribadian Presiden Jokowi. Jika artikel yang ditulis oleh Tomy Darma Putra ini menjelaskan secara umum idiosinkratik Jokowi penulis akan lebih berfokus pada indikator persepsi yang juga merupakan bagian dari idiosinkratik. Berbeda dengan artikel ini, penulis lebih berfokus pada persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1. Persepsi**

Bojang AS berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan aktivitas politik suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan memposisikan negara tersebut di posisi yang tepat di antara negara lainnya.<sup>21</sup> Tujuan utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut Bojang AS juga menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan dinamika hubungan internasional seperti distribusi kekuasaan, pembentukan aliansi, perlombaan persenjataan dll. Sedangkan faktor internal merupakan faktor

---

<sup>21</sup> Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018).

yang berasal dari negara itu sendiri, seperti ekonomi, populasi, geografi hingga personalitas pembuat kebijakan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh suatu negara juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh personalitas terutama persepsi aktor utama yang berperan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini jika diaplikasikan ke Indonesia, maka kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki oleh Presiden yaitu Joko Widodo. Persepsi dapat diartikan sebagai konsep yang menggambarkan konstruksi realitas yang dialami oleh individu dalam menetapkan kebijakan luar negeri.<sup>23</sup> Dengan kata lain persepsi individu terbentuk oleh bagaimana cara individu tersebut dalam memahami lingkungan sekitarnya termasuk hubungannya dengan individu lain.

Dalam bukunya *Making American Foreign Policy*, yang ditulis oleh Ole Rodulf Holsti menjelaskan lebih lanjut tentang persepsi yang mana adanya keterkaitan antara sistem kepercayaan, citra, dan proses pengambilan kebijakan.<sup>24</sup> Pengambil kebijakan biasanya melibatkan kepercayaan atau kepercayaannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga kepercayaan yang dimiliki oleh pengambil kebijakan berpengaruh terhadap kebijakan yang ia ambil. Selanjutnya pengambil kebijakan juga bertindak berdasarkan “citranya” terhadap situasi tertentu dibandingkan pada realitas “objektif” yang terjadi.

---

<sup>22</sup> AS, “The Study of Foreign Policy in International Relations.”

<sup>23</sup> Richard Herrmann, “The Power of Perceptions in Foreign-Policy Decision Making: Do Views of the Soviet Union Determine the Policy Choices of American Leaders?,” *American Journal of Political Science* 30, no. 4 (November 1986): 841, <https://www.jstor.org/stable/2111276?origin=crossref>.

<sup>24</sup> Ole Holsti, *Making American Foreign Policy* (Routledge, 2013), <https://www.taylorfrancis.com/books/9780203625446>.

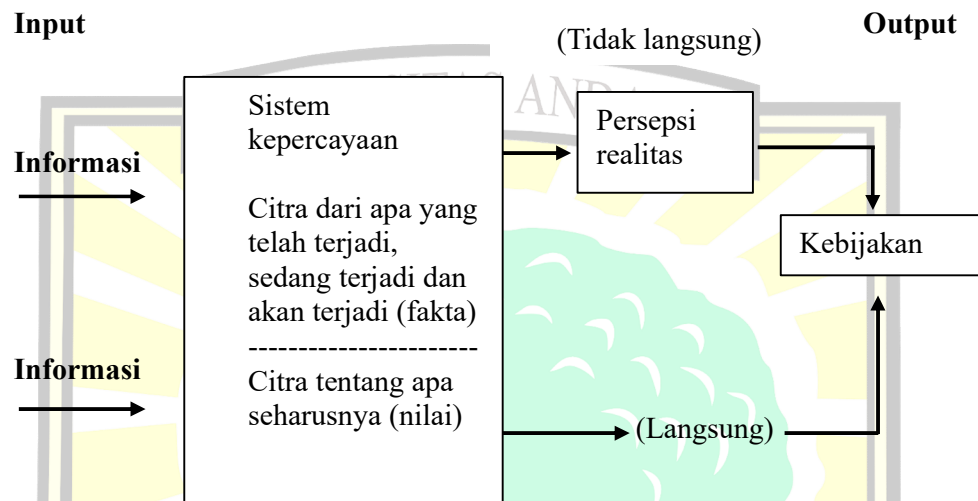
Sehingga citra yang terbentuk oleh pengambil kebijakan juga berpengaruh terhadap kebijakan yang ia ambil. Holsti menjabarkan indikator-indikator yang mempengaruhi persepsi dalam proses pengambilan kebijakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Sistem kepercayaan (*belief system*) diartikan sebagai kepercayaan yang dimiliki oleh pengambil kebijakan terhadap aktor lain maupun situasi tertentu. Sistem kepercayaan terdiri dari serangkaian citra tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sistem kepercayaan juga merupakan rangkaian pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri dan dunia dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambilnya. Sistem kepercayaan juga dapat dipahami sebagai pandangan yang dimiliki oleh individu dalam memahami informasi tentang lingkungan fisik dan sosial. Sistem kepercayaan (*belief*) terbentuk berdasarkan informasi-informasi yang diterima oleh pembuat kebijakan terkait lingkungannya selama perjalanannya kehidupannya.
2. Citra (*image*) dapat diartikan sebagai gambaran terhadap individu maupun negara tersebut. Citra negara dapat diartikan sebagai citra nasional, kebijakan yang diambil akan disesuaikan dengan situasi dengan citra negara tersebut. Menurut Holsti, pembuat kebijakan bertindak atau menetapkan kebijakan berdasarkan pandangan mereka terhadap situasi tertentu dan berdasarkan pada citra yang dimiliki oleh negara dan citra mereka sendiri. Citra juga berkaitan dengan sistem kepercayaan yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, yang mana sistem kepercayaan yang

---

<sup>25</sup> Holsti, *Making American Foreign Policy*.

dimiliki oleh pengambil kebijakan secara tidak langsung dipengaruhi oleh citra yang melekat pada negara. Citra mungkin saja sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.



**Gambar 1.1 Hubungan Pengaruh Sistem Kepercayaan dan Citra dengan Pengambilan Kebijakan**

Sumber: OR.Holsti 2013

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa, terdapat dua bentuk hubungan antara sistem kepercayaan dengan proses pengambilan kebijakan yaitu hubungan langsung (*direct*) dan hubungan tidak langsung (*indirect*). Pertama dalam hubungan langsung informasi yang diterima dipahami sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, tidak diproses terlebih sebelum menghasilkan kebijakan. Kedua adalah hubungan tidak langsung, dalam hubungan ini, input informasi akan diproses dan membentuk sistem kepercayaan yang terdiri dari citra tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, selanjutnya membentuk persepsi terhadap realitas hingga menghasilkan kebijakan.

Input terhadap informasi, sistem kepercayaan terhadap kenyataan dan keadaan lingkungan sekitar lah yang membangun persepsi individu dalam proses pengambilan kebijakan, yang digunakan untuk merespons suatu isu yang terjadi. Citra dan sistem kepercayaan memiliki hubungan yang saling timbal balik. Citra mempengaruhi sistem kepercayaan, dan sistem kepercayaan mempengaruhi citra. Sistem kepercayaan dapat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi individu dan ini menjadi patokan referensi oleh pengambil kebijakan dalam proses penetapan kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan negara.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menjelaskan bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022. Data-data untuk penelitian didapatkan dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal ilmiah, berita, hingga *website* resmi pemerintahan, sehingga penelitian ini akan berfokus pada tinjauan studi pustaka. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan rinci. Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina 2022 dengan menggunakan konsep persepsi.

### **1.8.2. Batas Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis membatasi batas waktu penelitian dengan rentang waktu 2022. Batas penelitian pada tahun 2022 tersebut dipilih karena operasi militer yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina diawali pada tahun tersebut



dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam mediasi konflik Rusia-Ukraina juga terjadi pada tahun 2022. Secara spesifik penelitian ini berfokus pada proses pengambilan kebijakan Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia - Ukraina sebelum dilaksanakannya KTT G20 di Bali pada November 2022.

### 1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Dalam sebuah penelitian studi hubungan internasional biasanya terdapat unit analisis, unit eksplanasi dan tingkatan analisa. Unit analisis merupakan objek yang perilakunya perlu dilakukan penelitian, dengan kata lain unit analisis merupakan variabel dependen.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah persepsi Presiden Joko Widodo. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang dapat mempengaruhi perilaku dari unit analisis, dengan kata lain unit eksplanasi merupakan variabel independen.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah respons Indonesia dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022. Penelitian ini merupakan analisa induksionis, yang mana tingkatan unit eksplanasi lebih tinggi dari tingkatan unit analisis. Unit analisis dengan tingkatan individu dan unit eksplanasi dengan tingkatan sistem regional dan global.

Menurut John Rourke terdapat tiga level analisis dalam proses analisis kebijakan luar negeri yaitu, level analisis individu, level analisis negara, dan level analisis sistem internasional.<sup>28</sup> Level analisis individu melibatkan pemahaman bagaimana seorang individu sebagai manusia dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Level analisis negara menekankan kepada karakteristik suatu negara, bagaimana aktor subnasional di suatu negara dapat mempengaruhi pemerintahnya

---

<sup>26</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1994).

<sup>27</sup> Mas' oed, *Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi*.

<sup>28</sup> John T Rourke, *International Politics on the World Stage* (Mcgraw-Hill PP - New York, 2008).

untuk menetapkan suatu kebijakan tertentu. Sedangkan level analisis sistem internasional berfokus pada pendekatan *top-down* terhadap politik internasional yang mengkaji karakteristik sosial-ekonomi-politik-geografis dari sistem internasional dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tindakan negara dan aktor lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan level analisis individu.

#### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mana data tersebut didapatkan melalui proses studi pustaka. Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang sudah pernah diolah atau ditulis terlebih dahulu.<sup>29</sup> Sedangkan studi pustaka maksudnya adalah peneliti mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini melalui berbagai macam sumber bacaan, seperti situs resmi pemerintah, artikel berita, dokumen, buku, jurnal artikel hingga penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Terkait situs resmi pemerintah tentang kebijakan luar negeri Indonesia diakses melalui situs [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), dan situs resmi pemerintahan lainnya seperti diakses melalui situs [www.state.gov](http://www.state.gov). Artikel berita bersumber dari artikel berita nasional maupun luar negeri seperti Antara, Reuters dan New York Times.

Selanjutnya data dari jurnal diakses melalui jurnal berikut, *Jurnal of Political Sciences & Public Affairs*, *Academic Journal of Interdisciplinary studies*, *Journal of Global Strategic Studies*, *American Journal of Political Science*, *Global Food Security*, *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, *Defense and Security Studies*, *International Politics*, Jurnal Penelitian Politik, dan *Indonesia Journal of International Relations*. Sedangkan data yang

---

<sup>29</sup> J.D Creswell, J.W. & Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications Inc, vol. 1, 2018.

bersumber dari buku diperoleh melalui buku-buku yang berjudul *Making American Foreign Policy*, *International Politic on the World Stage*, *Global Encyclopedia of Public Administration*, dan *Public Policy, and Governance*. Data yang dikumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis dan dijadikan sumber acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh John W Creswell. Dalam bukunya *Research design: Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Creswell* membagi teknik analisis data menjadi lima tahapan bagian yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, melakukan koding terhadap data, membuat deskripsi dan tema, dan yang terakhir adalah menyajikan deskripsi dan tema tersebut.<sup>30</sup>

##### **a. Menyiapkan data**

Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melihat bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal, buku, berita, hingga situs resmi pemerintah.

##### **b. Membaca keseluruhan data**

Pada tahap ini, penulis membaca kembali data yang telah dikumpulkan dan disiapkan tersebut, hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman

---

<sup>30</sup> Creswell, J.W. & Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, vol. 1, hal. .

penulis terhadap data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan membaca kembali data-data yang telah dikumpulkan terkait bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022 sehingga membentuk pemahaman penulis tentang gagasan umum dari keseluruhan data tersebut.

c. Melakukan koding terhadap data

Pada tahap ini, penulis akan melakukan koding atau melakukan pengelompokan terhadap data yang telah ada. Data yang ada akan dikelompokkan ke dalam berbagai kategori. Dalam penelitian ini data dikategorikan ke bagaimana Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina dan hal-hal yang mempengaruhi pembentukan persepsi Presiden Joko Widodo yang mana hal ini berkaitan dengan sejarah hidup Presiden Joko Widodo.

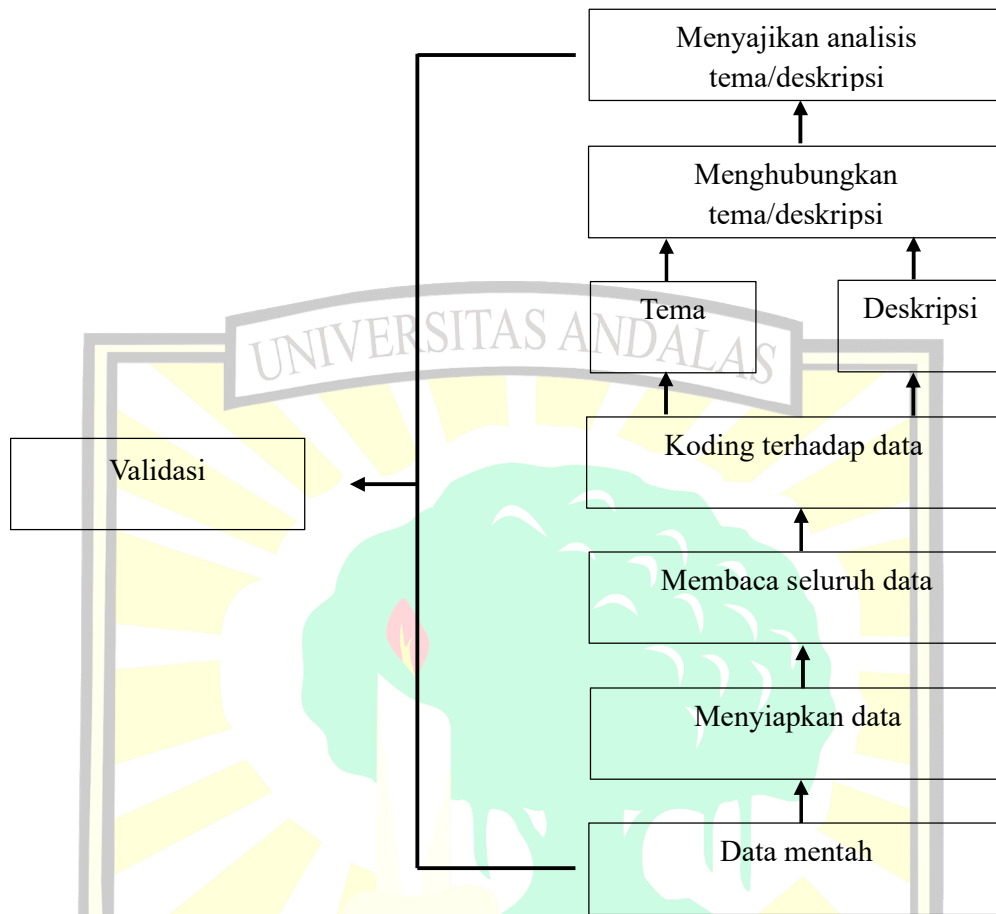
d. Membuat deskripsi dan tema

Pada tahap ini penulis akan membuat deskripsi dan tema terhadap data yang telah dikoding tersebut. Dalam bagian deskripsi peneliti menjelaskan atau menjabarkan lebih lanjut informasi-informasi yang didapatkan dari penelitian tersebut. Sedangkan pada bagian tema digunakan untuk menghasilkan hasil analisis yang lebih kompleks

e. Menyajikan deskripsi dan tema

Pada tahap ini deskripsi dan tema digunakan untuk menganalisis dan menyajikan hasil penemuan dalam penelitian ini.

## Teknik Analisis Data



**Gambar 1.2 Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**

Sumber: Creswell (2018)

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II INDONESIA DAN KONFLIK RUSIA - UKRAINA 2022**

Bab ini penulis menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi tindakan Indonesia hingga akhirnya merespons konflik Rusia-Ukraina 2022. Pembahasan dalam Bab ini dimulai dari penjelasan tentang gambaran umum konflik Rusia-Ukraina 2022 dimulai dari penyebab terjadinya konflik tersebut, bagaimana konflik tersebut mempengaruhi Indonesia terutama dalam konteks Indonesia sebagai ketua G20 2022, hingga terakhir penulis menjelaskan bagaimana respons Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina 2022.

### **BAB III SEJARAH HIDUP JOKO WIDODO**

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan hidup Presiden Joko Widodo. Penjelasan ini dimulai sejak masa kecilnya, kariernya sebagai pengusaha mebel, karier politik hingga penjelasan tentang kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya. Penjelasan tentang sejarah hidup Joko Widodo ini sangat penting untuk dilihat karena hal ini yang membentuk persepsi. Pada bab ini penulis



menjelaskan sejarah perjalanan hidup Presiden Joko Widodo yang berpengaruh dalam pembentukan persepsinya.

#### **BAB IV PERSEPSI PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MERESPON KONFLIK RUSIA – UKRAINA**

Bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam merespons konflik Rusia-Ukraina 2022 yang dijelaskan melalui indikator sistem kepercayaan (*belief system*) dan citra (*image*).

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan menjelaskan secara ringkas hasil dari keseluruhan penelitian ini dan saran merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya.

